BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak hanya memengaruhi sektor swasta, namun juga sektor publik. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor publik, khususnya pada domain pemerintahan yang dikenal dengan istilah *e-government* atau pemerintahan digital kini tengah menjadi prioritas kebijakan utama berbagai negara di dunia guna meningkatkan resiliensi dan efisiensi instansi pemerintahan (Sugianto et al., 2025).

Sebagai upaya mewujudkan transformasi digital pemerintahan, Pemerintah Indonesia menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE merupakan kebijakan yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai instrumen reformasi birokrasi yang bertujuan menggeser orientasi aparatur pemerintah dari pendekatan yang menitikberatkan pada kepatuhan administratif *(compliance based)* menuju pengelolaan kinerja yang berfokus pada pencapaian hasil *(results based management).* Melalui implementasi SAKIP, instansi pemerintah dituntut untuk memastikan adanya keterkaitan yang selaras antara visi dan tujuan strategis organisasi dengan program serta kegiatan yang dijalankan, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara terarah dan memberikan dampak

nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Azizah et al., 2026).

Pada evaluasi 2022, data menunjukkan masih banyak pemerintah daerah yang memperoleh predikat B dan CC, yang menggambarkan akuntabilitas kinerja yang belum sepenuhnya efektif dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis *outcome*. Pada evaluasi 2023, rata-rata nilai SAKIP pemerintah kabupaten/kota mencapai 63,36 dan pemerintah provinsi 72,17, dengan hanya 1 pemerintah daerah memperoleh predikat AA dan sekitar 20 pemerintah daerah memperoleh predikat A, sementara mayoritas lainnya berada pada kategori BB dan B (PANRB, 2023).

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada periode 2022-2024, kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara nasional menunjukkan tren perbaikan namun masih didominasi oleh kategori menengah.

Meskipun tren peningkatan nilai SAKIP terlihat berlanjut, distribusi predikat masih menunjukkan dominasi kelas menengah seperti BB dan B dengan kenaikan taraf wilayah yang mencapai predikat A masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan sistem manajemen kinerja telah diterapkan dan menunjukkan perbaikan nilai secara bertahap, integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja berbasis hasil belum sepenuhnya optimal di banyak pemerintah daerah.

Fenomena implementasi akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Lhokseumawe, berdasarkan evaluasi internal yang tertuang dalam dokumen

perencanaan strategis daerah, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Lhokseumawe menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode 2020-2024, nilai SAKIP Kota Lhokseumawe meningkat dari 55,00 (kategori CC) menjadi 61,12 (kategori B), yang mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah secara bertahap. Peningkatan ini mengindikasikan adanya respons positif terhadap upaya penguatan akuntabilitas kinerja melalui integrasi perencanaan dan pelaksanaan program.

Tabel 1. 1 Capaian Komponen Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe

No	Komponen Nilai SAKIP	Bobot	2020	2021	Bobot	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20.10	20.22	30	20.29	22.15	22.37
2	Pengukuran Kinerja	25	9.19	9.22	30	13.05	14.09	14.32
3	Pelaporan Kinerja	15	8.73	8.75	15	8.76	9.19	9.37
4	Evaluasi Internal	10	5.80	5.83	25	13.70	14.75	15.06
5	Capaian Kinerja	20	11.18	11.38	-	-	-	-
Nilai Hasil SAKIP		**100**	**55.00**	**55.40**	**100**	**55.80**	**60.18**	**61.12**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**CC**		**CC**	**B**	**B**

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja sektor publik yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematik dari

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan serta mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

E-budgeting merupakan salah satu wujud penerapan e-government yang diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik (Sakti et al., 2023). Penerapan *e-budgeting* di Kota Lhokseumawe masih menghadapi permasalahan, seperti adanya perubahan program dan kegiatan pada APBK Perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, perubahan alokasi anggaran, serta realisasi program yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun proses penganggaran telah didukung oleh sistem elektronik, implementasi *e-budgeting* masih memerlukan peningkatan kualitas pengelolaan agar mampu menghasilkan penganggaran yang lebih efektif dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(Mutia et al., 2023).

Penerapan *e-procurement* merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengimplementasikan sistem pengadaan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun demikian, implementasi e-procurement tidak hanya

bergantung pada keberadaan sistem elektronik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi pengadaan, kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, ketersediaan infrastruktur, serta sosialisasi kepada para pelaku pengadaan (Fauzan et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani et al. (2023) , dengan judul penelitian Pengaruh *E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement* Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Variabel *e-planning* dan *e-budgeting* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Jawa Tengah. Namun sebaliknya, untuk variabel *e-procurement*, memberi bukti empiris pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Praktik *E-Planning, E-Budgeting,* dan *E-Procurement* di Jawa Tengah masih sangat rendah, sehingga SAKIP tidak bisa terpengaruh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurlina, (2025), Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-budgeting* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik, sedangkan *e-procurement* dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Namun, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Namun, secara simultan *e-budgeting*, *e-procurement*, komitmen organisasi, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al., (2025), Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SIPD dan *E-Procurement* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap SAKIP. Selain itu, kedua variabel tersebut juga

berpengaruh positif terhadap *Good Governance*, sementara *Good Governance* terbukti berpengaruh signifikan terhadap SAKIP. Namun, *Good Governance* tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara SIPD dan SAKIP, melainkan memediasi hubungan antara *E-Procurement* dan SAKIP. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan prinsip good governance agar pemanfaatan sistem digital, khususnya SIPD dan *E-Procurement*, dapat secara maksimal mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Triseptya et al., (2026) hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran publik. Sistem ini memperkuat mekanisme pengendalian internal melalui pencatatan elektronik, otomasi pelaporan, pemantauan real-time, dan jejak audit yang lebih jelas. Integrasi antara *e-planning* dan *e-budgeting* juga terbukti meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan anggaran. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola organisasi, budaya birokrasi, serta integritas aparatur pemerintah.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *e-budgeting* tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, komitmen etika aparatur, serta konsistensi kebijakan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan reformasi digital dengan reformasi kelembagaan dan budaya organisasi guna memastikan *e-budgeting* berfungsi secara optimal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat

good governance dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa hasil empiris mengenai pengaruh penerapan *e-procurement* dan *e-budgeting* terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan, sementara penelitian lainnya menemukan bahwa variabel tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi sistem digital pemerintahan sangat dipengaruhi oleh konteks daerah, kualitas tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen organisasi dalam mendukung reformasi birokrasi berbasis kinerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan *E-budgeting, E-procurement* Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya ialah:

1. Apakah *e-budgeting* berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah *e-procurement* berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-budgeting* terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan menggunakan variabel *e-budgeting* dan *e-procurement.* Penelitian ini memperkaya literatur empiris terkait pengaruh penerapan *e-budgeting* dan *e-procurement* terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terutama dalam konteks pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam

meningkatkan efektivitas penerapan *e-budgeting* dan *e-procurement* guna memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Temuan penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Instansi Pengelola Keuangan dan Organisasi Perangkat Daerah Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperbaiki integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sehingga pelaksanaan program lebih terarah dan berbasis pada pencapaian output dan outcome yang terukur.